

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin meningkatnya kebutuhan untuk menyejahterakan masyarakat serta meningkatnya dana pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih intensif. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang sangat potensial dan berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijakan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian, juga dapat mengatur sumber-sumber ekonomi. Selain itu, pajak juga merupakan sumber utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Jika melihat kondisi seperti ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan biaya dan pembangunan yang besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan di berbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak.

Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir penerimaan pajak selalu di bawah target. Buruknya situasi perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan. James Alm (Darussalam, *Tax Policy Analysis: Mendongkrak Pajak dari Underground Economy*, 1998:3) mengatakan pengampunan pajak atau tax amnesty, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Terdapat argumentasi bahwa kebijakan tax amnesty berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance) di masa mendatang setelah tax amnesty dilakukan. Hal itu di dasari oleh sebuah harapan bahwa setelah dilakukan tax amnesty, aset atau kekayaan

Wajib Pajak sebelumnya berada di luar sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, sehingga Wajib Pajak ke depannya tidak akan mengelak dari kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak maka dilakukan Program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

Mengingat dilakukannya Program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, maka tugas akhir ini disusun dengan judul **“Tinjauan Prosedur Penerapan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup penulisan dengan menitikberatkan pembatasan pada butir-butir sebagai berikut:

1. Pengertian Perpajakan
2. Pengertian Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)
3. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*
4. Karakteristik *Tax Amnesty*
5. Prosedur Penerapan *Tax Amnesty*
6. Tujuan Penerapan *Tax Amnesty*
7. Manfaat Penerapan dilakukannya *Tax Amnesty*

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan, sedangkan tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang prosedur penerepan Tax Amnesty.

2. Untuk membandingkan dan menerapkan teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan praktik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.
3. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Disamping mempunyai tujuan, Laporan Tugas Akhir ini memiliki kegunaan:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Menambah pengetahuan mengenai prosedur penerapan Tax Amnesty di KPP Pratama Semarang Barat.
  - b. Pembandingan antara tinjauan teori dan tinjauan praktik.
2. Bagi Universitas Diponegoro
  - a. Meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Diponegoro yang baik.
  - b. Terjalannya Kerjasama antara Universitas dengan Perusahaan.
  - c. Sebagai bahan evaluasi pencapaian materi yang diberikan kepada mahasiswa.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat
  - a. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian bagi mahasiswa Universitas Diponegoro.
  - b. Untuk menjalin hubungan baik dengan Universitas Diponegoro.

## **1.4 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data**

### **1.4.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisis pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin masalah yang penting yang ingin di tanyakan saat itu. Data yang diperoleh berupa gambaran umum tentang tax amnesty, prosedur tax amnesty, tujuan tax amnesty, manfaat tax amnesty yang didapat secara lisan oleh Bapak Sutiyono selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Ibu Rr. Setyo Wahyu Ningsih dan Bapak Catur Sugiarto selaku Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

## 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah langkah penting yang dilakukan seorang peneliti setelah menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya melakukan kajian yang berkaitan dengan teori penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan informasi dari kepustakaan yang berhubungan, seperti: buku, catatan, atau dokumen lainnya. Data yang diperoleh dari studi pustaka berupa Peraturan Menteri Keuangan tentang tax amnesty, prosedur tax amnesty, serta modul tentang gambaran umum KPP Pratama Semarang Barat.

## 3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung tentang keadaan yang ada di lapangan. Data yang diperoleh dari metode observasi berupa kegiatan pengamatan proses tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

### **1.4.2 Jenis Data**

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan. Menurut sumbernya data terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau pengamatan langsung. Teknik yang digunakan yaitu dengan

mewawancarai Bapak Sutyono selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Ibu Rr Setyo Wahyu Ningsih dan Bapak Catur Sugiarto selaku Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan data yang diperoleh berupa gambaran umum tentang tax amnesty, prosedur tax amnesty, tujuan tax amnesty, manfaat tax amnesty.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer dan diperoleh secara tidak langsung tetapi dengan memanfaatkan hasil studi pustaka. Data yang diperoleh berupa Peraturan Menteri Keuangan tentang tax amnesty, prosedur tax amnesty, serta modul tentang gambaran umum KPP Pratama Semarang Barat.

### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Setiap laporan memiliki sistematika penulisan untuk mempermudah dalam proses penulisan. Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT**

Bab ini menguraikan tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Visi dan Misi, serta Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

#### **BAB III LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori dan tinjauan praktik prosedur penerapan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan tentang tinjauan teori prosedur penerapan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat